

Factors That Can Influence the Prevention of Fraud in the Management of Village Funds



Faktor – Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Annisa Sahira¹⁾, Sarwenda Biduri^{*,2)}

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: sarwendabiduri@umsida.ac.id

Abstract. : *In this modern era, fraud in the management of village funds is a form of crime that often occurs and is committed by village officials. Fraud itself can be defined as a criminal act of fraud that is carried out intentionally by the perpetrator with the aim of obtaining greater profits (funds) and causing losses to the victim. This study aims to determine the effect of the variables Whistleblowing System, Good Village Governance, and the Effectiveness of Internal Control on Fraud Prevention in Village Fund Management. The data analysis technique used in this study is Multiple Linear Regression with the help of SPSS Version 26. The results of this study indicate that the Whistleblowing System, Good Village Governance, and Internal Control Effectiveness have an effect on Fraud Prevention in Village Fund Management.*

Keywords - *Whistleblowing System, Good Village Governance, Internal Control Effectiveness, Fraud Prevention in Village Fund Management.*

Abstrak. Di zaman modern ini, kecurangan dalam pengelolaan dana desa merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi dan dilakukan oleh pengurus desa. Kecurangan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai tindak pidana dilaksanakan dengan sengaja oleh pelaku guna untuk mendapatkan keuntungan (dana) yang lebih besar dan memberikan kerugian pada pihak korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel Whistleblowing System, Good Village Governance, dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Regresi Linier Berganda dengan bantuan SPSS Versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Whistleblowing System, Good Village Governance, dan Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci - Whistleblowing System, Good Village Governance, Efektivitas Pengendalian Internal, Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

I. PENDAHULUAN

Didalam pemerintahan desa diperlukan untuk memiliki pengelolaan dana baik pengeluaran atau pemasukan secara baik dan terperinci. Hal tersebut ditujukan agar kepala pemimpin dapat mengontrol dan mengawasi laju keluar masuknya dana desa. Pengurus atau pegawai desa dapat diarahkan dan ditunjuk sebagai saksi dalam pengelolaan dana desa tersebut. Proses pengelolaan dana tersebut dapat dilakukan secara transparan dan bersifat akuntabel, sehingga bisa sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh pemerintahan desa tersebut.

Di zaman modern ini, kecurangan dalam pengelolaan dana desa merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi dan dilakukan oleh pengurus desa. Kecurangan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai tindak pidana penipuan yang dilaksanakan secara sengaja oleh pelaku guna untuk mendapatkan keuntungan (dana) yang lebih besar dan memberikan kerugian pada pihak korban. Dapat dikatakan bahwa, tindak kecurangan telah menjadi tindak ancaman untuk berbagai pihak pemerintahan baik daerah maupun negara.

Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar dan diperuntukan untuk pembangunan kesejahteraan desa membuat kepala desa harus melakukan pengelolaan yang didasari oleh asas umum pengelolaan keuangan desa. Namun, dalam prosesnya masih banyak kepala desa yang melakukan praktik

kecurangan (*fraud*). Menurut hasil data pemantauan *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tahun 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi aparatur desa disepanjang tahun 2015-2020 dengan total kerugian negara sebesar Rp 111 miliar [1]. Kasus fraud tersebut didominasi oleh korupsi dengan nilai 64,4% [2]. Hasil survei dari pementaan kasus korupsi tahun 2020 menunjukkan bahwa pada semester 1 sektor anggaran dana desa menjadi penyumbang kasus korupsi terbesar dengan jumlah 44 kasus dan kerugian yang ditimbulkan sebesar 16,6 miliar [3]. Menurut analisis *Indonesia Corruption Watch (ICW)* tahun 2018, tindak pidana korupsi atau kecurangan dalam pengelolaan desa memiliki berbagai modus, meliputi: *fictitious activities or projects* dengan 15 kasus, *fictitious report* dengan 17 kasus, *budget misuse* dengan 51 kasus, *inflated the budget* dengan 14 kasus, dan *embezzlement* dengan 32 kasus. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mengemukakan bahwa problem utama terjadi kasus korupsi atau kecurangan dana desa yaitu pengelolaan dana desa yang tidak menggunakan prinsip partisipasi dan keterbukaan kepada masyarakat [4].

Upaya pencegahan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan dapat diatasi dengan mengimplementasikan teori *fraud triangle* sebagai metode analisisnya. Teori *fraud triangle* merupakan pendapat terkait penyebab terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan [5]. Melalui teori tersebut para instansi terkait dapat melakukan tindakan pencegahan atas kecurangan dalam pengelolaan dana. Individu dengan karakter jujur dan tanggung jawab sangat dibutuhkan dalam proses pencegahan kecurangan pengelolaan dana untuk menjaga keamanan dana serta agar sesuai dengan yang direncanakan [6], terdapat tiga faktor penyebab kecurangan dalam pengelolaan data, meliputi: *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rationalization* (rasionalisasi).

Pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana dapat dilakukan oleh karyawan atau pemimpin organisasi selaku saksi melalui saranan yang telah disediakan oleh instansi tersebut. *Whistleblowing system* merupakan salah satu saranan yang dapat digunakan sebagai pengaduan atas kasus kecurangan yang terjadi pada sebuah instansi atau organisasi besar maupun kecil. Oleh karena itu, secara tidak langsung *Whistleblowing system* berperan sebagai pengawas di sebuah organisasi [7].

Whistleblowing system dapat didefinisikan sebagai tindak pengungkapan atas sikap pelanggaran hukum, tidak patut atau sikap lain yang merugikan dan mengharuskan instansi tersebut mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut [8]. Pengungkapan kecurangan harus dilakukan dengan niat baik dan bukan bentuk protes pribadi terhadap prosedur di instansi atau organisasi, serta bukan fitnah [9]. *Whistleblowing system* dapat digunakan sebagai *early warning system* apabila terjadi kecurangan (*fraud*), tetapi untuk kasus kecurangan yang telah terdeteksi maka kecil kemungkinan tindak kecurangan terjadi [10]. Sehingga *Whistleblowing system* dapat dikatakan sebagai sarana efektif untuk pecegahan atas tindak kecurangan dalam pengelolaan dana. Terdapat tiga indikator yang yang dapat mengukur efektivitas *Whistleblowing system* diantaranya yaitu aspek perawatan, aspek operasional dan aspek struktural [11].

Dalam *Whistleblowing system*, terdapat individu yang berperan sebagai pelapor atas tindak pelanggaran, yang dikenal sebagai *Whistle-blower*. *Whistle-blower* didefinisikan sebagai individu yang memberikan informasi terkait contoh pelanggaran kepada individu yang berwenang atau terkait [11]. Program *Whistle-blower* meminta karyawan untuk memberikan informasi atas pelanggaran program *anti-fraud*. Dapat dikatakan bahwa, *Whistleblowing system* adalah mekanisme efektif untuk pecegahan kecurangan melalui komitmen perusahaan sebagai pelindung informasi pribadi pelapor, media pelaporan yang jelas dan bertanggung jawab, serta proses evaluasi dan perbaikan [12].

Good village governance adalah wujud penerimaan dari pentingnya perangkat peraturan dengan mengatur fungsi, ketentuan dan hubungan dari berbagai golongan layanan publik atau bisnis [13]. Makna dari *Good village governance* menuntut penyediaan informasi terkait dan mendeskripsikan pentingnya kinerja sektor publik terkait tanggung jawab atas aktivitas kepada pihak terkait dan tuntutan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dengan diiringi oleh peningkatan pendidikan dan pengetahuan masyarakat [13]. Selain itu, alokasi jumlah dana yang besar ke desa, pengelolaan keuangan yang kritis dan variasi jumlah laporan memerlukan tanggung jawab yang besar dari pemerintah desa. Tata kelola yang baik dapat diterapkan melalui prinsip akuntansibilitas

dalam pengelolaan keuangan desa dengan tanggung jawab pemerintah yang sesuai dengan peraturan. Indikator *Good village governance* yang telah terwujud dengan baik meliputi; 1) Tata kelola keuangan yang baik 2) Tidak terdapat tindak penyalahgunaan kekuasaan berkaitan dengan masalah hukum 3) Perencanaan desa yang terintegrasi, partisipasi serta sesuai dengan perencanaan daerah dan nasional 4) Meningkatnya pelayanan masyarakat [14].

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal, yang menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan proses integral atas tindakan dan kegiatan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemimpin dan karyawan terkait pembekalan keyakinan penuh atas tujuan organisasi yang tercapai melalui masalah pelaporan keuangan, kegiatan efektif dan efisien, keamanan aset negara, dan kepatuhan atas undang-undang [15]. Dengan kata lain, pengendalian internal merupakan keseluruhan tindakan dalam usaha pendeteksian kesalahan, penyimpangan dan penipuan dengan tujuan untuk memastikan aktivitas transaksi benar dan aset perusahaan telah dilindungi dengan batasan akses kepada orang berwenang saja. Aktivitas pengendalian terdapat di semua level baik karyawan level terendah hingga level tertinggi, hal tersebut dikarenakan seluruh operasi perusahaan merupakan bukti kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan dokumentasi [16]. Pengendalian internal dibagi menjadi dua bentuk, yaitu; pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi [17]. Pengendalian administratif terdiri dari perencanaan organisasi, pencatatan dan prosedur proses keputusan otoritas manajemen atau transaksi. Sedangkan, pengendalian akuntansi meliputi perencanaan prosedur, organisasi dan catatan terkait perlindungan *asset* dan masalah pencatatan akuntansi untuk memberikan keyakinan yang masuk akal. Dalam pengendalian internal terdapat lima kompone yang berkaitan dengan pernyataan dalam model pengendalian COSO, meliputi; penentuan risiko, lingkungan pengendalian, pengewasan, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi [17].

Pengendalian internal sangat dibutuhkan dalam mencegah terjadinya kecurangan didalam laporan keuangan dana desa, hal tersebut didasari oleh kemungkinan peluang terjadinya kecurangan yang di akibatkan oleh lemahnya internal control sebuah instansi, pengawasan yang kurang dan penyalahgunaan wewenang [18]. Oleh karena itu, penerapan pengendalian yang baik dan efektif dalam sebuah instansi dapat membantu upaya dalam pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian ini berpacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [19] yang berkaitan dengan analisis pengaruh dari *Whistleblowing System* terhadap pecegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Prambanan, Klaten. Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada variabel independen yaitu *Whistleblowing*, pada variabel dependen yaitu pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dan objek jangkauan penelitian yang memiliki tempat yang hampir sama. Sedangkan, perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah tidak terdapat variabel independen yaitu *Good village governance* dan efektivitas pengendalian, serta variabel lain yang digunakan dalam penelitian tersebut. Sehingga, penambahan variabel didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [20] dengan tajuk “Pengaruh *Whistleblowing system, Good Government Governance* Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa SE-Kecamatan Denpasar Utara)” yang dalam penelitian tersebut variabel *good village governance* dan efektivitas pengendalian internal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa dan pada penelitian ini juga mempunyai keterbaruan pada objek penelitian. Pada objek penelitian terdahulu hanya menggunakan 3 Desa, Sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan 6 desa.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system, good village governance*, dan efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran atau gagasan berkaitan dengan ilmu akuntansi, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Hubungan Antar Variabel

Fraud Diamond Theory digunakan dalam penelitian ini karena teori ini menjelaskan faktor-faktor penting yang menyebabkan perilaku curang dan oleh karena itu diperlukan institusi untuk mencegah kecurangan. Hal ini menuntut individu untuk memiliki rasa tanggung jawab dan integritas, agar pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik. Menurut interpretasi teori berlian penipuan dalam [10], ada empat faktor penyebab penipuan, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan.

Dana desa termasuk anggaran yang berawal dari APBN, kemudian ke kas desa melalui 2 tahap alokasi, dana ditransfer secara bertahap ke daerah (atas) yang disebut dana desa, dan transfer dana melalui mekanisme APBD kabupaten/kota, dimana 10 % dialokasikan oleh APBD daerah Pemerintah dikaitkan dengan kas desa secara bertahap yang disebut Penyaluran Dana Desa (ADD).

Fraud merupakan tindakan yang berlawanan dengan regulasi yang ada, oleh karena itu kecurangan harus dihentikan supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Jenis-jenis kecurangan (*fraud*) yaitu menyalahgunakan asset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Pencegahan kecurangan merupakan suatu cara untuk meminimalkan kesempatan, menangkal, juga dapat menilai setiap aktivitas yang berdampak pada terjadinya kecurangan. [10]

Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Whistleblowing system merupakan tindakan yang merujuk pada pengungkapan dan pelaporan atas sikap tidak patut dan keurangan yang mengaruskan organisasi melaporkan tindakan tersebut, sehingga dapat mencegah terjadi kecurangan pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh [21] mengemukakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis pertama yang dapat ditarik adalah:

H1: Terdapat pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana.

Pengaruh Good Village Governance Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

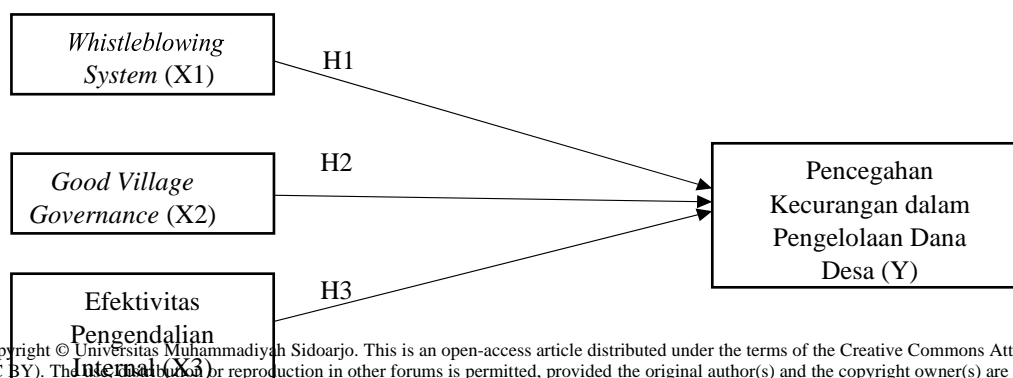
Teori dasar yang digunakan menggunakan Teori Fraud, *Good village governance* merupakan wujud dari penataan atau pengelolaan tata kelola melalui fungsi, ketentuan dan hubungan dari berbagai golongan layanan publik atau bisnis. Variabel *good village governance* memiliki pengaruh terhadap variabel pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh [22] dan [20] menyatakan bahwa *good village governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis kedua yang dapat ditarik adalah:

H2: *Good village governance* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana.

Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Efektivitas pengendalian internal merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendeteksi segala bentuk kesalahan yang ditujukan untuk memastikan aktivitas transaksi benar dan aset perusahaan terlindungi. Hubungan antara variabel pengendalian internal dan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dapat dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh [23] dan [24] yang mengemukakan jika pengendalian sistem internal memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga yang dapat ditarik daalam penelitian ini adalah:

H3: Terdapat pengaruh dari pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana.



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

II. METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan pengujian hipotesis. Pendekatan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis data berupa angka atau numerik dengan skala statistik. Tujuan dari analisis tersebut untuk menguji hipotesis antar variabel yang digunakan dalam penelitian [20].

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari tempat dilaksanakannya penelitian [17]. Data tersebut diperoleh melalui kuisioner yang diberikan kepada seluruh pegawai perangkat desa serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Sidoarjo. Selain itu, penulis juga melakukan survey untuk melihat langsung kondisi tempat penelitian.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai perangkat desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Sidoarjo, dengan jumlah 58 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling [20]. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu sekretaris desa, kepala desa, kasi desa (meliputi kasi pelayanan, kasi pemerintahan dan kasi kesejahteraan), kaur desa (meliputi; kaur perencanaan, kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum) dan ketua BPD.

Tabel 1. Daftar Responden

Nama Responden	Jumlah Responden
Sekretaris Desa	6
Kepala Desa	6
Kasi Desa	
Kasi Pelayanan	5
Kasi Pemerintahan	6
Kasi Kesejahteraan	6
Kaur Desa	
Kaur Perencanaan	6
Kaur Keuangan	6
Kaur Tata Usaha dan Umum	5
Jumlah Keseluruhan	58

Sumber: Dibuat Oleh Penulis

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuisioner kepada seluruh pegawai perangkat desa di Kecamatan Sidoarjo. Survey juga dilakukan oleh penulis untuk mengetahui latar belakang dari populasi yang akan diteliti. Kuisioner yang akan dibagikan memiliki dua bagian, dimana pada bagian pertama responden diwajibkan untuk mengisi data diri dan selanjutnya berisi sejumlah pertanyaan terkait hubungan antara *whistleblowing system*, *good village governance* dan efektivitas pengendalian internal dengan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Skala likert dengan 5 point digunakan untuk mengukur kuisioner yang dibagikan kepada responden. Untuk menganalisis data kuantitatif dalam penelitian ini, maka jawaban responden diberikan skor sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator Variabel

No	Variabel	Indikator	Referensi
1.	<i>Whistleblowing System</i> (X1)	Aspek structural, aspek perawatan dan aspek operasional	[11]
2.	<i>Good Village Governance</i> (X2)	Tranparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran	[25]
3.	Efektivitas Pengendalian Internal (X3)	Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian	[17]
4.	Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa (Y)	Membatasi keadaan tindak penipuan dan mengurangi tekanan pada karyawan	[22]

Setelah penjabaran variabel selesai, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi persamaan pengujian yang digunakan dalam penelitian ini. Persamaan tersebut dapat dilakukan melalui identifikasi variabel kedalam rumus sebagai berikut:

$$KPD = \alpha + \beta_1 WS + \beta_2 GVG + \beta_3 EPI + e$$

Keterangan:

KPD = Kecurangan dalam Pengelolaan Dana

α = Konstanta

WS = *Whistleblowing system*

GVG = *Good village governance*

EPI = Efektivitas Pengendalian Internal

e = error

Untuk tahap selanjutnya, data yang tersebut akan ditabulasi dan diolah menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan bantuan alat uji SPSS (Statistical Package for Social Science) sebagai alat untuk menganalisis data.

Sebelum melakukan uji pengaruh, maka akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan data hasil kuisioner kemudian dilakukan Uji T guna untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka Hipotesis diterima. Selain itu dapat pula menggunakan Uji Signifikan, dengan ketentuan jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Selanjutnya dilakukan Uji Koefisien Determinan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antar variabel yang diteliti. Nilai koefisien Determinasi berada antara 0 dan 1, jika mendekati 1 maka semakin kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan terhadap beberapa Desa yang ada di Kecamatan Sidoarjo yaitu pada Desa Sumpat, Desa Sarirogo, Desa Cemengbangkalan, Desa Jati, Desa Lebo dan Desa Banjarbendo. Dimana penelitian ini ditujukan kepada Pegawai Perangkat Desa pada Desa tersebut. Dengan responden 58 pegawai perangkat Desa. Adapun karakteristik responden yang diolah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.
Karakteristik Responden

Kriteria	Frequency (Orang)	Presentase(%)
Pendidikan Terakhir		
S1	24	41,4
SMA	34	58,6
Jabatan		
Kepala Desa	6	10,3
Sekretaris Desa	6	10,3
Kaur Tu dan Umum	5	8,6
Kaur Keuangan	6	10,3
Kaur Perencanaan	6	10,3
Kaur Pemerintahan	6	10,3
Kasi Pelayanan	5	8,6
Kasi Kesejahteraan	6	10,3
Kasun	12	20,7
Pemerintah Desa		
Desa Banjarbendo	11	19
Desa Sarirogo	10	17,2
Desa Sumpat	9	15,5
Desa Cemengbangkalan	9	15,5
Desa Jati	9	15,5
Desa Lebo	10	17,2

Sumber : *Data Primer, 2023*

Dapat dilihat dari tabel 3. menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini terdapat 24 orang dari jenjang pendidikan S1 dan 34 orang dari jenjang pendidikan SMA. Selanjutnya berdasarkan Jabatan, responden terbanyak yaitu pada jabatan kasun sebanyak 12 atau 20,7%. Kemudian untuk kriteria pemerintah desa, responden terbanyak terdapat pada Desa Banjarbendo sebanyak 11 atau 19,0% .

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif mempunyai tujuan untuk mempermudah peneliti memperoleh suatu gambaran berdasarkan kecenderungan atau tendensi dari jawaban responden tentang variabel-variabel penelitian yang digunakan. Berikut adalah uraian atas hasil analisis deskriptif dari setiap variabel penelitian.

Tabel 4.
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Total.X1	Total.X2	Total.X3	Total.Y
Mean	58	0,118	0,318	0,314	0,409

Std. Deviation	58	0,899	2,421	2,392	3,114
Minimum	58	12	27	37	35
Maximum	58	14	35	44	44
Valid N (listwise)	58				

Sumber : *Data Olahan SPSS (versi 23), 2023*

Hasil Uji Keabsahan Data

Uji Validitas

Tabel 5.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pertanyaan	Pearson Corelation (r Hitung)	Nilai Kritis (r Tabel)	keterangan
Whistleblowing System (X1)	1	0,933	0,254	Valid
	2	0,589	0,254	Valid
	3	0,589	0,254	Valid
	4	0,589	0,254	Valid
Good Village Governance (X2)	1	0,864	0,254	Valid
	2	0,864	0,254	Valid
	3	0,871	0,254	Valid
	4	0,871	0,254	Valid
	5	0,871	0,254	Valid
	6	0,692	0,254	Valid
	8	0,692	0,254	Valid
Efektivitas Pengendalian Internal (X3)	1	0,851	0,254	Valid
	2	0,767	0,254	Valid
	3	0,766	0,254	Valid
	4	0,766	0,254	Valid
	5	0,83	0,254	Valid
	6	0,83	0,254	Valid
	7	0,766	0,254	Valid
Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desan (Y)	2	0,294	0,254	Valid
	3	0,915	0,254	Valid
	4	0,821	0,254	Valid
	5	0,915	0,254	Valid
	6	0,915	0,254	Valid
	7	0,915	0,254	Valid
	8	0,311	0,254	Valid
	9	0,915	0,254	Valid

Sumber : *Data Olahan SPSS (versi 23), 2023*

Berdasarkan tabel tersebut, semua item kuisioner yang dipakai untuk mengukur variabel dapat dinyatakan valid karena mempunyai nilai r hitung yang lebih besar dibandingkan r tabel.

Hasil Uji Reabilitas

Tabel 6.
Hasil Uji Reabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Whistleblowing System (X1)	0,678	Reliabel
Good Village Governance (X2)	0,9	Reliabel
Efektivitas Pengendalian Internal (X3)	0,923	Reliabel
Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa (Y)	0,981	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS (versi 23), 2023

Berdasarkan tabel 6 hasil uji reabilitas tersebut, item-item pernyataan atas instrumen tiap variabel dikatakan reliabel karena memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60. Menurut [26] kuisioner dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,60.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.898	5.818		4.967	0.000
	TOT.X1	-1.127	0.477	-0.325	-2.360	0.022
	TOT.X2	-0.796	0.178	-0.619	-4.474	0.000
	TOT.X3	1.227	0.219	0.943	5.603	0.000

a. Dependent Variable: TOT.Y

Sumber : Data Olahan SPSS (versi 23), 2023

Berdasarkan tabel Coefficients^a diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 28.898 - 1.127X1 - 0.796X2 + 1.227X3 + \epsilon$$

Pengujian Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.622 ^a	0.386	0.352	2.506

a. Predictors: (Constant), TOT.X3, TOT.X1, TOT.X2

b. Dependent Variable: TOT.Y

Sumber : Data Olahan SPSS (versi 23), 2023

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi, didapatkan nilai R square sebesar 0.386 yang berarti bahwa pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 38,6%. Dapat diartikan bahwa variabel *Whistleblowing System*, *Good Village Governance*, Pengendalian Internal berpengaruh sebesar 38,6% terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa. Sedangkan sisanya 61,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini.

Hasil Uji t (uji parsial)

Tabel 9.
Hasil uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.898	5.818		4.967	0.000
	TOT.X1	-1.127	0.477	-0.325	-2.360	0.022
	TOT.X2	-0.796	0.178	-0.619	-4.474	0.000
	TOT.X3	1.227	0.219	0.943	5.603	0.000

a. Dependent Variable: TOT.Y

Sumber : Data Olahan SPSS (versi 23), 2023

Berdasarkan tabel hasil uji t di atas terlihat bahwa thitung *Whistleblowing System* adalah 2.360 dan ttabel adalah 2.001 sehingga thitung > ttabel serta signifikansi variabel *Whistleblowing System* adalah 0.022 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Berdasarkan hasil tersebut, H1 diterima maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Whistleblowing System* (X1) secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

Nilai thitung variabel *Good Village Governance* adalah 4.474 sedangkan ttabel adalah 2.001 sehingga thitung > ttabel dengan signifikansi pada variabel *Good Village Governance* adalah 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Sehingga H2 diterima dan dapat diambil kesimpulan bahwa *Good Village Governance* secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

Nilai thitung untuk variabel Pengendalian Internal adalah 5.603 dan ttabel sebesar 2.001 sehingga thitung > ttabel. Untuk variabel Pengendalian Internal tingkat signifikansinya adalah 0.000 lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05. Dengan begitu H3 diterima dan dapat dijelaskan bahwa variabel Pengendalian Internal secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, menjelaskan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh negatif terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian [27] yang menyatakan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh negatif terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. Hal ini berarti bahwa meningkatnya *Whistleblowing System* justru akan menyebabkan penurunan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian dapat dikaitkan dengan *Fraud Diamond Theory* yang menyatakan bahwa *Opportunity*, yaitu situasi yang membuka peluang untuk memungkinkan fraud. Menurut [27] hal ini disebabkan karena SDM di pemerintahan desa kurang memahami apa itu *Whistleblowing System*.

Pengaruh *Good Village Governance* Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, menjelaskan bahwa *Good Village Governance* berpengaruh negatif terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian [28] yang menyatakan bahwa *Good Village Governance* berpengaruh negatif terhadap Pencegahan Kecurangan. Hal ini berarti bahwa *Good Village Governance* kurang dijalankan dengan baik sehingga pencegahan kecurangan pada pengelolaan Dana Desa mengalami penurunan [29]. Hasil ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh [22]. Hasil penelitian ini mendukung *Fraud Diamond Theory* yang menyatakan bahwa *Rationalization* merupakan sikap atau karakter yang menyebabkan individu melakukan fraud secara rasional yang memungkinkan mereka untuk secara sadar dan sengaja melakukan tindakan tidak jujur sehingga pencegahan kecurangan pada pengelolaan Dana Desa mengalami penurunan.

Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian, menjelaskan bahwa Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian [14] dan [5] yang menyatakan bahwa Efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini diartikan pengendalian internal yang dievaluasi dengan baik akan dapat mencegah terjadinya kecurangan, pengendalian internal yang lemah dapat memberi celah pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan [30]. Kemudian hasil penelitian ini mendukung *Fraud Diamond Theory* yang menyatakan bahwa kesempatan dapat meningkatkan risiko terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dimana orang tersebut juga harus memiliki *competence/capability* untuk mengenali apakah ada pintu terbuka sebagai peluang untuk memanfaatkannya.

PENUTUP KESIMPULAN

Riset ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana. Subyek pada penelitian ini adalah Pemerintahan Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Sidoarjo, dengan menggunakan sampel sebanyak 58 responden guna menjawab pertanyaan riset yang telah dirumuskan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Whistleblowing System* berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. Artinya ketika *Whistleblowing System* ditingkatkan justru akan membuat pencegahan kecurangan dana desa menurun. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa di Kecamatan Sidoarjo kurang memahami apa itu *Whistleblowing System*.
2. *Good Village Governance* berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. Artinya ketika *Good Village Governance* ditingkatkan justru akan membuat pencegahan kecurangan dana desa menurun.
3. Efektivitas Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan dalam Pengelolaan Dana Desa. Artinya pengendalian internal yang dievaluasi dengan baik akan dapat mencegah terjadinya kecurangan.

SARAN

1. Kepada pemerintah desa Kecamatan Sidoarjo, di harapkan agar dapat meningkatkan *Whistleblowing System*, *Good Village Governance*, dan Efektivitas Pengendalian Internal dengan mengikuti sosialisasi agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan atau *fraud* yang dapat meningkatkan pencegahan *fraud* khususnya dalam pengelolaan dana desa.
2. Pada penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang tidak di teliti pada penelitian ini. Selain itu penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitiannya guna mendapat perbandingan hasil.
3. Kemudian pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode wawancara untuk mengetahui determinasi yang bisa mencegah terjadinya kecurangan pengelolaan keuangan dana desa.

IMPLIKASI

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan maupun wawasan ilmiah kepada penulis dan pembaca mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa
2. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan terhadap literatur maupun penelitian dibidang akuntansi.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian.

KETERBATASAN

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu objek penelitian ini hanya dilakukan di Pemerintah Desa di Kecamatan Sidoarjo. Hal ini memungkinkan adanya perbedaan hasil pembahasan maupun kesimpulan untuk objek penelitian yang berbeda. Selain itu keterbatasan lainnya yaitu penggunaan variabel yang masih terbatas, dimana variabel yang diteliti hanya *Whistleblowing System*, *Good Village Governance*, dan Efektivitas Pengendalian Internal.

Sedangkan masih banyak variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi pencegahan fraud dalam Pengelolaan Dana Desa.

REFERENSI

- [1] J. Fathia and M. Indriani, "Pengaruh sistem keuangan desa terhadap pencegahan kecurangan (fraud) pengelolaan dana desa dengan moralitas individu sebagai pemoderasi (studi di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh)," *NCAF (Proceeding Natl. Conf. Account. Financ.*, vol. 4, pp. 455–468, 2022, doi: 10.20885/ncaf.vol4.art57.
- [2] Z. Wardah, A. Carolina, and A. Wulandari, "Pengaruh Whistleblowing System, Internal Control, Leadership Dan Budaya Organisasi Terhadap Fraud Prevention," *Nominal Barom. Ris. Akunt. dan Manaj.*, vol. 11, no. 2, pp. 247–269, 2022, doi: 10.21831/nominal.v11i2.49346.
- [3] A. K. Wakhidah and K. Mutmainah, "Bystander Effect, Whistleblowing System, Internal Locus of Control dan Kompetensi Aparatur dalam Pencegahan Fraud Dana Desa," *J. Econ. Bus. Eng.*, vol. 3, no. 1, pp. 29–39, 2021, doi: 10.32500/jebe.v3i1.1993.
- [4] E. Rahmawati, S. Sarwani, R. Rasidah, and M. Yulastina, "Determinan Fraud Prevention Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar," *J. Akunt.*, vol. 10, no. 2, pp. 129–152, 2020, doi: 10.33369/j.akuntansi.10.2.129-152.
- [5] S. K. P. Alam, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dana Desa di Pemerintah Desa Dengan Budaya Etis Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang)," Universitas Muhammadiyah Magelang, 2022.
- [6] K. Akhyaar, A. H. Purwantini, N. Afif, and W. A. Prasetya, "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa," *Krisna Kumpul. Ris. Akunt.*, vol. 13, no. 2, pp. 202–217, 2022.
- [7] C. R. Anandya and D. N. S. Werastuti, "Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali," *J. Ilm. Akunt. dan Humanika*, vol. 10, no. 2, p. 185, 2020, doi: 10.23887/jiah.v10i2.25933.
- [8] F. Islamiyah, A. Made, and A. R. Sari, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu dan Desa Pato)," *J. Ris. Mhs. Akunt.*, vol. 8, no. 1, pp. 1–13, 2020, doi: 10.21067/jrma.v8i1.4452.
- [9] S. W. Setiyowati, M. F. Irianto, and I. Tyasari, "Determinan Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Dimoderasi Kompetensi Aparatur," *Organum J. Saintifik Manaj. dan Akunt.*, vol. 5, no. 1, pp. 62–72, 2022, doi: 10.35138/organum.v5i1.197.
- [10] N. K. A. Suandewi, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan)," *Hita Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 3, pp. 29–49, 2021, doi: 10.32795/hak.v2i3.1799.
- [11] R. F. Riyanto and Z. Arifin, "Efektivitas Whistleblowing System Dan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada Sektor Publik Yang Dimoderasi Oleh Pendeteksian Fraud," *J. Magister Akunt. Trisakti*, vol. 9, no. 2, pp. 105–122, 2022, doi: 10.25105/jmat.v9i2.12922.
- [12] B. Marciano, A. Syam, Suyanto, and N. Ahmar, "Whistleblowing System dan Pencegahan Fraud: Sebuah Tinjauan Literatur," *J. Akunt. Berkelanjutan Indones.*, vol. 4, no. 3, pp. 313–324, 2021.
- [13] N. I. Sari and J. Majid, "PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UPAYA MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE," vol. VII, no. 2, pp. 194–217, 2021, doi: 10.24252/jiap.v7i2.26850.
- [14] A. Ardiyanti and Y. N. Supriadi, "Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance serta impikasinya pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang," *Manaj. Bisnis*, vol. 8, no. 1, pp. 1–15, 2018.
- [15] Romadaniati, T. Taufik, and A. Nasir, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintahan Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bengkalis)," *Bilancia J. Ilm. Akunt.*, vol. 4, no. 3, pp. 227–237, 2020.
- [16] S. Wahyuni and N. Hayati, "Pengaruh good corporate governance, pengendalian internal, dan whistleblowing system terhadap fraud," *J. Bus. Bank.*, vol. 12, no. 1, pp. 115–132, 2022, doi: 10.14414/jbb.v12i1.3260.
- [17] R. E. Wijaya, "Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System Terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Se-Kabupaten Temanggung)," 2020.

- [18] M. B. Fahreza, W. S. Nugroho, and A. H. Purwantini, "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo)," *Bus. Econ. Conf. Util. Mod. Technol.*, vol. 13, no. 2, pp. 584–605, 2022.
- [19] L. P. Dewi, K. Sunaryo, and R. Yulianti, "PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI, PRAKTIK AKUNTABILITAS, DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten)," *J. Akunt. Trisakti*, vol. 9, no. 2, pp. 327–340, 2022, doi: 10.25105/jat.v9i2.13870.
- [20] N. L. G. K. Dewi and K. D. Padnyawati, "Pengaruh Whistleblowing System, Good Government Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara)," *Hita Akunt. dan Keuang.*, no. 2798–8961, pp. 334–344, 2022.
- [21] N. P. A. Widyawati, E. Sujana, and G. A. Yuniarta, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDES (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng)," *J. Ilm. Mhs. Akunt.*, vol. 10, no. 3, pp. 368–379, 2019.
- [22] G. E. Ferdianti and H. Priono, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN APBDES DI KECAMATAN PRAMBON," *Equilibrium*, vol. 11, no. 2, pp. 28–34, 2022.
- [23] A. T. Atmadja and K. K. Saputra, "Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa," *Ilm. Akunt. dan Bisnis*, vol. 12, no. 1, pp. 7–16, 2017.
- [24] N. Y. Hanurani and Jaeni, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Persepsi Karyawan Dalam Pencegahan Fraud (Studi Empiris Pada PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda)," *Kompak J. Ilm. Komputerisasi Akunt.*, vol. 15, no. 1, pp. 38–48, 2022, doi: 10.51903/kompak.v15i1.596.
- [25] F. Fajrin, F. H, and M. Suwandi, "Good Villange Governance: Mencegah Fraud Pengelolaan Keuangan Dana Melalui Aplikasi Siskeudes," *ISAFIR Islam. Account. Financ. Rev.*, vol. 3, no. 2, pp. 172–186, 2022.
- [26] E. Maryanti, *Modul Statistik Akuntansi*. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2022.
- [27] C. D. Manoppo, "Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Bos," Universitas Mulawarman Samarinda, 2022. [Online]. Available: <https://feb.unmul.ac.id>
- [28] K. T. Patrarini, "Pengaruh Peran Auditor Internal, Pengendalian Internal, dan Implementasi Good Corporate Governance terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud)," Universitas Islam Sultan Agung, 2018.
- [29] N. M. M. Ariastuti, R. D. A. W, and N. P. Y. Yuliantari, "Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lpd Se- Kecamatan Denpasar Utara," *Hita Akunt. dan Keuang.*, vol. 1, no. 2, pp. 798–824, 2020, doi: 10.32795/hak.v1i2.1010.
- [30] R. E. Wijaya, "Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal Dan Whistleblowing System terhadap Efektivitas Pencegahan Kecurangan," Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.